



12 KAPANEWON DI BANTUL MASUK ZONA MERAH

Makin Tak Terkendali,

Positif Corona di Yogya Nambah 791

YOGYA (MERAPI)- Penambahan kasus harian virus corona di Yogya makin tak terkendali. Pemda DIY pun kembali mencatat rekor kenaikan kasus positif Covid-19, Kamis (24/6) sebanyak 791 kasus, sehingga total kasus terkonfirmasi menjadi 55.463 kasus. Sementara kasus

sembuh masih tidak meningkat, tidak lebih dari 300 kasus per hari, dan jumlah kematian setiap harinya belasan kasus.

"Penambahan kasus sembuh sebanyak 258 kasus sehingga total sembuh menjadi 46.644 kasus

*Bersambung ke halaman 9

Makin

dan 11 kasus meninggal sehingga total kasus meninggal menjadi 1.422 kasus," ujar Juru Bicara Pemda DIY untuk penanganan Covid-19, Berty Murtiningsih.

Berty menambahkan, distribusi kasus terkonfirmasi Covid-19 masih didominasi warga Sleman sebanyak 319 kasus, disusul Bantul 249 kasus, Kulon Progo 131 kasus, 79 warga Kota Yogyakarta, dan 13 warga Gunungkidul.

"Rincian riwayat kasus terdiri dari 122 kasus periksa mandiri, 613 kasus hasil tracing kasus sebelumnya, 3 kasus hasil screening karyawan kesehatan, 3 kasus perjalanan luar daerah, dan 50 kasus belum ada info," ujarnya.

Sementara distribusi kasus sembuh terdiri dari 47 warga Kota Yogyakarta, 118 warga Bantul, 17 warga Kulon Progo, 15 warga Gunungkidul, dan 61 warga Sleman.

Di Bantul, sebanyak 12 dari 17 kapanewon di Bantul masuk dalam kategori zona merah. Sementara lima kapanewon lainnya masuk dalam kategori zona oranye. Hal ini menyebabkan Bantul menjadi salah satu kabupaten

zona merah di DIY. Bahkan akibat tingginya jumlah pasien Covid-19, rumah sakit mulai mengantisipasi berkurangnya stok oksigen dengan mengandalkan agen-agen kecil.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bantul, Sri Wahyu Joko Santosa mengakui penambahan pasien covid-19 cukup signifikan. Sehingga berdampak pula pada persediaan oksigen di sejumlah rumah sakit di Bantul. Menurutnya hal ini juga dialami daerah lain di DIY. "Iya (menipis), sama dengan yang lain se-DIY," sebutnya, Kamis (24/6).

Padahal, dikatakan pria yang akrab dipanggil Oki ini, distributor oksigen tidak hanya melayani wilayah DIY saja, namun juga sebagian wilayah Jawa Tengah. Sehingga pihaknya mencoba untuk mencari pasokan dari agen-agen kecil.

Selain itu pihaknya juga terus berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah DIY. "Kami juga mencari dari agen kecil," terangnya.

Sebelumnya diberitakan RSUD Panembahan Senopati (RSPS) harus

Tind

☐ Untuk

☐ Untuk

3.

menambah intensitas pasokan oksigen untuk memenuhi kebutuhan pasien baik Covid-19 maupun pasien umum. Kepala Humas RSPS Bantul, Siti Rahayuningsih mengungkapkan pasokan oksigen sebelumnya dilakukan sekitar 5 hari sekali. Namun semenjak peningkatan kasus Covid-19 meningkat signifikan, pasokan oksigen bertambah menjadi seminggu dua kali.

"Karena pasien covid-19 yang masuk itu bergejala sedang dan berat pasti butuh oksigen, termasuk juga untuk pasien umum," ungkapnya.

Sementara itu Pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro di Kota Yogyakarta disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 14 tahun 2021 terkait perpanjangan dan pengetatan PPKM mikro. Beberapa aturan PPKM mengalami perubahan dan disesuaikan dengan Instruksi Mendagri untuk mengendalikan penularan Covid-19.

"Ya memang ada perubahan terkait instruksi Mendagri tersebut. Selebihnya sebagian besar sudah dilakukan Pem-

kot Yogyakarta untuk merespons perkembangan kasus Covid-19 di Kota Yogyakarta," kata Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi, Kamis (24/6).

Heroe menjelaskan hal-hal yang berubah di antaranya mengenai jam tutup usaha restoran, kafe dan layanan umum yang semula pukul 21.00 WIB menjadi pukul 20.00 WIB. Termasuk dari segi kapasitas restoran, kafe maupun tempat pertemuan dari semula 50 persen menjadi 25 persen.

"Terkait pelaksanaan PPKM mikro terutama menyikapi tentang pertumbuhan kasus Covid-19 akhir-akhir ini yang diminta dilakukan secara lebih ketat," ujarnya.

Menurutnya sebelum Instruksi Mendagri itu keluar, Pemkot Yogyakarta sudah melakukan pengetatan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan untuk mencegah sebaran Covid-19.

Dicontohkan dalam pelaksanaan pertemuan dibatasi dan mengurangi kegiatan rapat tatap muka dengan memanfaatkan rapat secara daring.

Terkait pemberian sanksi bagi pelang-

gar protokol kesehatan, pihaknya menyatakan hal itu sudah diberikan legitimasi dalam Instruksi Mendagri. Pemberian sanksi tersebut juga dibahas dalam rapat bersama dengan Gubernur DIY.

"Tapi dalam penerapannya (sanksi) sedang dikoordinasikan. Terutama dalam pelaksanaannya akan melibatkan Satpol PP Kota Yogyakarta, Kodim, Polresta, Satpol PP DIY dan lainnya," terang Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta itu.

Pihaknya menegaskan pelaksanaan operasi gabungan terkait penegakan protokol kesehatan sebenarnya sudah dilakukan sejak beberapa hari lalu. Terutama mengenai pemeriksaan acak terhadap pelaksanaan protokol kesehatan, pengecatan secara acak kendaraan di jalan, tempat parkir, destinasi wisata dan layanan umum lainnya.

"Dengan adanya Instruksi Mendagri tersebut menguatkan langkah bersama Satgas Covid-19 Kota Yogyakarta yang selama ini sudah dilakukan," tandas Heroe.

Sambungan halaman 1

(C-4/C-1/Tri)



Ponpes Nurul Iman lockdown setelah ada temuan puluhan santri positif Covid-19.

MERAPI RIZA MARZUKI

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. BPBD			

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005